



28 Ribu Data Penduduk Akan Dibekukan

Masih Bertambah sebelum Jadi DP4

JOGJA - Nama orang yang telah meninggal atau pindah masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) tak akan terulang dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2017. Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kota Jogja sejak 2015 lalu mulai membersihkan data penduduk ganda. Termasuk, data penduduk pasif yang di pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) lalu masih muncul.

Kepala Disdukcapil Kota Jogja Sisruwadi mengungkapkan, pihaknya membekukan sekitar 28 ribu data penduduk. Karena dinilai tidak aktif.

"Jumlah itu masih akan terus bertambah. Karena, saat ini kami masih lakukan pembersihan," ungkap Sisruwadi kemarin (14/1).

Ia meneruskan, jika ada penduduk yang mengeluh, karena datanya dibekukan, mereka bisa datang ke dinas. Petugas akan mengurusnya dan mengaktifkan kembali data kependudukannya. "Tidak masalah, tinggal mengaktifkan lagi," imbuhnya.

Apalagi kini telah menerapkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Penerapan e-KTP ini membantu meningkatkan kualitas data kependudukan. Warga tak mungkin memiliki dua KTP sekaligus. Begitu pula jika ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda, akan ditolak oleh sistem.

Program pembersihan data kependudukan yang dilakukan awal tahun ini untuk meningkatkan kualitas data. Salah satunya untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) guna menyongsong Pilwali 2017.

"Kami mengacu pada pemutakhiran data kependudukan yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 2015," jelasnya.

Tahun lalu, hasil pemutakhiran yang melibatkan perangkat RT dan RW sudah diolah dan tinggal menunggu hasilnya. Beberapa hal yang dilakukan, mulai menyisir pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, akta kelahiran, domisili, serta kondisi terakhir.

Disdukcapil Kota Jogja juga akan memberikan pemberitahuan pada ahli waris. Apabila ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, agar cepat mengurus akta kematian. Jika

tidak diurus, penduduk yang bersangkutan akan tetap tercatat dalam data.

Ini juga berlaku bagi penduduk yang pindah tempat tinggal. Tanpa mengurus mutasi kependudukan, tak ada pencoretan. Dari hasil pemutakhiran itu, akan diketahui berapa jumlah penduduk yang harus dicoret dari data. Baik disebabkan sudah meninggal dunia atau pindah kependudukan, serta berapa jumlah data yang harus dibekukan. "Target kami, Juni mendatang sudah bisa ditetapkan data potensial pemilih untuk pilwali," kata mantan Camat Jetis ini. Sebelumnya, Ketua KPU Kota Jogja

Wawan Budiarto mengungkapkan, validasi data kependudukan terus dilakukan. Tak hanya dengan berkoordinasi dengan Disdukcapil. Mereka juga sudah menjalin kerja sama dengan IRE untuk mengkaji faktor data pemilih.

"Data pemilih ini kami kaji, seberapa besar faktornya sebagai penyumbang angka golput," kata Wawan.

Ia menegaskan, setelah mendapatkan DP4 dari Disdukcapil, mereka akan benar-benar mengecek sampai tingkat RW. Harapannya, tak terjadi data ganda atau pun pemilih yang tak valid, karena meninggal atau pindah. (eri/hes)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005